



HANYA DUA FRAKSI AJUKAN PERUBAHAN ANGGOTA Alat Kelengkapan Dewan Tanpa Kocok Ulang

YOGYA (KR) - Wacana kocok ulang alat kelengkapan di DPRD Kota Yogya akhirnya menguap. Dalam sidang paripurna, Rabu (6/12) kemarin, hanya dua fraksi yang mengajukan perubahan keanggotaan, yakni Fraksi Golkar dan PPP.

Perubahan keanggotaan yang diajukan dua fraksi tersebut pun hanya sebatas pada Badan Musyawarah (Banmus). Sedangkan alat kelengkapan lain seperti Komisi A, B, C, dan D serta Badan Kehormatan, Badan Anggaran maupun Badan Pembuat Peraturan Daerah, sama sekali tidak ada perubahan.

"Dalam tata tertib dewan, ada peluang kocok ulang pada pertengahan periode. Tapi tidak ada fraksi yang mengajukan. Hanya Golkar dan PPP untuk

Banmus," urai Ketua DPRD Kota Yogya, Sujanarko, usai memimpin sidang paripurna kemarin.

Selain Fraksi Golkar dan PPP, sebenarnya ada perubahan keanggotaan alat kelengkapan di Fraksi PAN. Akan tetapi, hal itu lantaran ada proses pergantian antar waktu salah satu anggotanya sehingga harus disesuaikan.

Sujanarko mengaku tidak mempersoalkan kesempatan kocok ulang alat kelengkapan yang tak dimanfaatkan. Hal

tersebut dinilai bentuk kepercayaan pimpinan fraksi terhadap anggotanya agar fokus pada ketugasan di alat kelengkapan tersebut.

"Setidaknya ada tiga fungsi yang harus dijalankan yakni fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Meskipun tidak ada perubahan susunan anggota, namun hasil kinerja harus semakin optimal," imbuhnya.

Terkait fungsi legislasi, pihaknya akan mengusulkan batas kinerja setiap panitia khusus (pansus) dalam membahas raperda. Usulan tersebut akan disampaikan dalam rapat Banmus pada awal tahun anggaran. Jika disepakati, maka pimpinan dewan bakal menerbitkan surat keputusan

yang sifatnya mengikat.

Batas waktu, imbuh Sujanarko, dinilai menjadi instrumen dalam mengukur kinerja. Dengan begitu maka target raperda dalam satu tahun dapat diukur dengan jelas dan pasti. "Misal pansus diberi waktu tiga bulan. Jika belum selesai, dapat mengajukan tambahan waktu secara terbatas," tandasnya.

Hasil kinerja dari fungsi legislasi secara kuantitas memang terbilang rendah. Tahun ini, dari target 27 raperda, hanya mampu diselesaikan 9 raperda. Namun demikian, sebagian besar raperda yang tersendat akibat proses fasilitasi di Pemda DIY yang membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005